



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

---

# **Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI**

**KLIPING  
BERITA MEDIA CETAK  
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

---

**HARI RABU, 28 MARET 2013**



DAFTAR ISI

Jalan Tol .....	1
Air Bersih .....	2
Infrastruktur Listrik .....	3
Standar Pelayanan Jalan Tol .....	4
Bandara Kualanamu .....	5



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☐ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☒ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Target Tol Pesimistis Dicapai	<div>- Selain masalah pembebasan lahan dan anggaran, benturan peraturan antara kementerian dan lembaga terkait masih sering terjadi dan menghambat pembangunan</div> <div>- Target pemerintah terlalu berlebihan karena tidak diimbangi jangka waktu penyelesaiannya</div> <div>- Kadin Indonesia mengusulkan Peraturan Presiden No. 71/2012 direvisi supaya lebih aplikatif</div>					

Target Tol  
Pesimistis Dicapai

MIMPI JALAN TOL 5.405 KM

Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 5.405 km di seluruh Indonesia. Namun, kalangan swasta pesimistis target itu bisa dicapai jika kendala-kendala yang ada belum teratasi.

JAKARTA – Kalangan swasta tak yakin pemerintah bisa memenuhi target pembangunan jalan tol sepanjang 5.405 kilometer di seluruh Indonesia.

Selain masalah pembebasan lahan dan anggaran, benturan peraturan antara kementerian dan lembaga terkait pun masih sering terjadi dan menghambat pelaksanaan pembangunan. Pemerintah dinilai belum bisa menuntaskan masalah-masalah tersebut.

"Saya kok pesimistis ya. Kenapa, karena dari dulu targetnya besar-besar, namun pada akhirnya baru bisa selesai bertahun-tahun," kata Ketua Umum Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fathur Rochman saat dihubungi KORAN SINDO, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, target pemerintah terlalu berlebihan karena tidak diimbangi jangka waktu penyelesaian. Dia mengatakan, ada banyak kasus di mana pemerintah baru bisa menyelesaikan jalan tol hingga bertahun-tahun, seperti proyek Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta/ Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang dirancang sejak tahun 1990-an, yang hingga sekarang belum rampung 100%.

"Artinya, JORR ini saja belum tersambung semua. Jadi, gimana caranya mau menargetkan pembangunan tanpa batas waktu penyelesaian," ucapnya.

Fathur mengungkapkan, kalangan swasta telah berkali-kali mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi proyek

pembangunan jalan tol. Namun, upaya itu terus tersandung pada masalah pembebasan lahan, yang penyelesaiannya notabene merupakan tugas negara. "Ini bukan soal anggaran saja. Tapi ada benturan peraturan, baik itu yang ada di daerah atau lembaga terkait. Misalnya, ketika lahan itu milik negara mau dibangun tol, harus berurusan dengan Badan Pertanahan Nasional. Dan perizinan seperti itu juga butuh waktu," paparnya.

Masalah pembebasan lahan memang menjadi kendala utama proyek infrastruktur di Indonesia, karena ketika beredar informasi di satu titik akan ada proyek infrastruktur, harga lahan lantas melambung berkali lipat. Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan, banyak hal yang telah dilakukan pemerintah namun belum bersinergi di lapangan. "Ada banyak solusi, cuma belum ada kemauan saja dari stakeholder terkait untuk menyelesaikannya. Ini yang saya kira menghambat. Padahal, infrastruktur itu akses pertumbuhan kita," cetusnya.

Target pembangunan jalan tol sepanjang 5.405 km di seluruh Indonesia diungkapkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi V DPR kemarin. Kepala BPJT Ahmad Ghani Gazali mengatakan, panjang jalan tol yang sedang dalam tahap pembangunan atau masuk ke dalam program pemerintah saat ini mencapai 1.089 km, dan sebanyak 534 km di antaranya akan menjadi prioritas. Di sisi lain jalan tol yang telah terbangun dan beroperasi saat ini baru mencapai 774 km.

"Masalah pembebasan lahan ini memang menjadi kendala dan tak bisa diprediksi waktu

penyelesaiannya. Masalahnya juga berbeda antara satu dan yang lain, sehingga diperlukan perhatian semua pihak," ujar dia dalam rapat tersebut.

Revisi Perpres  
Pembebasan Lahan

Menyikapi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur tersebut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan Peraturan Presiden No 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum direvisi supaya lebih aplikatif. Salah satunya mengenai anggaran pembebasan tanah yang dialokasikan di APBN. Perpres tersebut hanya berlaku untuk proyek-proyek baru, sedangkan proyek lama tidak tersentuh.

"Proyek-proyek yang saat ini sedang berproses tapi tidak jalan, seperti 24 ruas jalan tol kami dorong juga supaya dianggarkan di APBN," kata Ketua Komite Tetap bidang Pengembangan Pelatihan Infrastruktur, Konstruksi, dan Properti Bambang Suroso sesuai rapat kerja Kadin bidang Infrastruktur, di Jakarta, kemarin.

Untuk itu, Kadin mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pusat Perizinan Terpadu, segera bersinergi dengan membentuk unit khusus untuk bisa segera membebaskan tanah dengan aturan lama sebelum Desember 2014. Dengan begitu, diharapkan proses pembebasan lahan dapat berlangsung secara pasti dan terprogram. Pemerintah juga diharapkan membuat kebijakan pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang belum memiliki kelayakan.

● Ichsan amin/  
akhmad nur huda



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

☐ Jan ☐ Feb ☒ Mar ☐ Apr ☐ Mei ☐ Jun ☐ Jul ☐ Agt ☐ Sep ☐ Okt ☐ Nov ☐ Des

2013

- ☒ Kompas  
☐ Republika  
☐ Rakyat Merdeka  
☐ Suara Karya
- ☐ Media Indonesia  
☐ Sinar Harapan  
☐ Seputar Indonesia  
☐ Neraca
- ☐ Koran Tempo  
☐ Suara Pembaruan  
☐ Investor Daily  
☐ Jurnal Nasional
- ☐ Bisnis Indonesia  
☐ Pikiran Rakyat  
☐ Kontan  
☐ Indopos
- ☐ Lain-lain,  
.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Air Cisdane Banyak Tercemar Limbah Industri	<div><div>- Berdasarkan hasil penelitian Japan International Cooperation Agency (JICA), bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Tangerang tahun 2012, 84% air sungai itu tercemar limbah domestik</div><div>- Untuk mengatasi pencemaran air baku, dalam satu tahun ini BLHD gencar memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak membuang limbah rumah tangga seenaknya</div></div>					

LINGKUNGAN

Air Cisdane Banyak Tercemar Limbah Domestik

TANGERANG, KOMPAS — Air Sungai Cisdane yang antara lain digunakan sebagai air curah bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kota dan Kabupaten Tangerang, Banten, telah tercemar. Berdasarkan hasil penelitian Japan International Cooperation Agency (JICA), bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Tangerang tahun 2012, 84 persen air sungai itu tercemar limbah domestik. Adapun 14 persen lainnya tercemar limbah dari industri yang tidak mempunyai instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).

Sisanya, sekitar 2 persen, berasal dari pencemaran limbah lainnya. "Pencemaran limbah ini jelas merusak kualitas air baku untuk dijadikan air curah bagi pelanggan PDAM (perusahaan daerah air minum)," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Affandi Permana, Rabu (27/3). Menurut Affandi, ada tiga kategori pencemaran air oleh limbah, yakni pencemaran ringan, sedang, dan berat. Pencemaran limbah Sungai Cisdane belum masuk dalam kategori berat.

**Sumur resapan dan IPAL** Untuk mengatasi pencemaran air baku, kata Affandi, dalam satu tahun ini BLHD gencar memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak membuang limbah rumah tangga seenaknya. Warga juga dianjurkan membuat sumur resapan. Kepada 63 dari 100 pabrik di Kota Tangerang diwajibkan memiliki IPAL. Direktur PDAM Tirta Benteng Marju Kodri, membenarkan kualitas air baku dari Sungai Cisdane yang diolah PDAM menjadi air curah tercemar limbah. Hasil penelitian setiap bulan

menunjukkan mutu air baku yang disedot PDAM dari Sungai Cisdane semakin buruk. "Air ini kalau diolah menjadi air bersih dengan kualitas tidak bagus untuk dikonsumsi. Makanya, kami harus memberikan perlakuan khusus agar menghasilkan air curah yang berkategori layak minum," kata Kodri. Menurut Kodri, di hulu, Bogor, kualitas air masih baik, tetapi di hilir, seperti Kota dan Kabupaten Tangerang, makin memprihatinkan. Dari Sungai Cisdane, PDAM menyuplai air curah kepada 27.000 pelanggan. (PIN)





Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

☐ Jan

☐ Feb

☒ Mar

☐ Apr

☐ Mei

☐ Jun

☐ Jul

☐ Agt

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

2013

☒ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☐ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Tanggal 1 April, Tarif Listrik Naik 4,3 Persen	<div>- Dengan kenaikan tarif listrik secara bertahap, pihaknya berharap hal itu akan menghindari gejolak di kalangan pelanggan PLN, baik rumah tangga maupun industri</div> <div>- Dengan kenaikan tarif tenaga listrik, subsidi listrik tahun 2013 diperkirakan bisa dihemat sekitar Rp. 14 triliun</div>				PT. PLN	

INFRASTRUKTUR

Tanggal 1 April, Tarif Listrik Naik 4,3 Persen

JAKARTA, KOMPAS — PT PLN berencana menaikkan kembali tarif tenaga listrik sebesar 4,3 persen per 1 April 2013. Hal ini sebagai kelanjutan dari kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif listrik secara bertahap sepanjang tahun ini demi menekan subsidi listrik.

Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji menyampaikan hal itu sesuai menghadiri seminar bertema "Gas untuk Energi Masa Depan" yang diprakarsai Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, Rabu (27/3), di Gedung DPR, Jakarta.

Menurut Nur Pamudji, per 1 April 2013, PLN akan menaikkan lagi tarif listrik 4,3 persen untuk semua golongan pelanggan, kecuali kelompok pelanggan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA. Hal ini sesuai dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif listrik rata-rata 15 persen secara bertahap per triwulan pada

tahun ini. Sebelumnya PLN telah menaikkan tarif listrik 4,3 persen pada 1 Januari lalu.

Di tempat terpisah, Sekretaris Perusahaan PT PLN Adi Supriyo menyatakan, dengan kenaikan tarif listrik secara bertahap, pihaknya berharap hal itu akan menghindari gejolak di kalangan pelanggan PLN, baik rumah tangga maupun industri.

"Kenaikan tarif listrik ini bisa membantu pemerintah untuk menghemat anggaran subsidi listrik," ujarnya.

Dengan kenaikan tarif tenaga listrik itu, subsidi listrik tahun 2013 diperkirakan bisa dihemat sekitar Rp 14 triliun. "Dengan adanya kenaikan tarif listrik tahap pertama pada Januari lalu, kami memperkirakan penambahan pendapatan PLN yang juga berarti penghematan subsidi listrik pada tiga bulan pertama tahun ini sekitar Rp 4 triliun," kata Adi sesuai menghadiri bedah bu-



Nur Pamudji

ku Saatnya Hati Bicara di Kantor Pusat PLN, Jakarta.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyatakan, rencana kenaikan tarif listrik tahap kedua pada 1 April nanti telah sesuai

dengan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, hal tersebut semestinya tidak perlu lagi menjadi polemik di ruang publik.

Namun, perlu dilihat sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan kenaikan tarif listrik itu terhadap upaya penghematan subsidi listrik. Subsidi listrik diperkirakan tetap akan naik jika kebutuhan bahan bakar minyak untuk sejumlah pembangkit listrik meningkat karena kekurangan pasokan gas dan permintaan energi listrik tumbuh pesat. Apalagi harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia crude oil price/ICP*) saat ini telah melampaui asumsi ICP dalam APBN 2013 yang ditetapkan 100 dollar AS per barrel.

Selain itu, kenaikan tarif listrik semestinya diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan PLN, terutama keandalan pasokan. (EYV)



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

2013

- ☐ Kompas
- ☐ Media Indonesia
- ☐ Koran Tempo
- ☒ Bisnis Indonesia
- ☐ Republika
- ☐ Sinar Harapan
- ☐ Suara Pembaruan
- ☐ Pikiran Rakyat
- ☐ Rakyat Merdeka
- ☐ Seputar Indonesia
- ☐ Investor Daily
- ☐ Kontan
- ☐ Lain-lain,
- ☐ Suara Karya
- ☐ Neraca
- ☐ Jurnal Nasional
- ☐ Indopos

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
10 Ruas Tidak Penuhi Standar Pelayanan	<div>- Penilaian untuk SPM yang dilakukan bagi pengelola jalan tol ini meliputi jalan berlubang, pagar yang tidak lengkap, standar keamanan dan juga keselamatan</div> <div>- SPM merupakan syarat untuk sebuah ruas jalan tol untuk dapat menaikan tarifnya sesuai aturan perundang-undangan per 2 tahun sesuai dengan besaran inflasi</div>			Rp.70 miliar	PT. Jasa Marga	

JALAN TOL

10 Ruas Tidak Penuhi Standar Pelayanan

JAKARTA—Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyatakan sebanyak 10 dari 28 yang sudah beroperasi tidak memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) pada semester II/2012.

Kepala BPJT Achmad Gani Ghazaly mengatakan penilaian untuk SPM yang dilakukan bagi para pengelola jalan tol ini meliputi jalan berlubang, pagar yang tidak lengkap, standar keamanan, dan juga keselamatan.

"Dari evaluasi yang telah kami lakukan, ada 10 ruas jalan tol yang tidak memenuhi SPM pada semester II/2012," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, Rabu (27/3).

Oleh karena itu, pihaknya telah menyurati operator jalan tol untuk memperbaiki kerusakan sesuai dengan SPM yang berlaku.

SPM merupakan syarat untuk sebuah ruas jalan tol untuk dapat menaikkan tarifnya sesuai aturan perundang-undangan per 2 tahun

sesuai dengan besaran inflasi.

"Dalam sebulan ke depan, kami akan menerima jawaban dari para operator tol tersebut mengenai kerusakan yang ada di jalan tol mereka," ujarnya.

Pada pertengahan Februari lalu, Gani menuturkan sebanyak 18 jalan tol tahun ini berpeluang memperoleh kenaikan tarif sebagaimana diatur dalam UU No. 38/2004 tentang Jalan, dengan penyesuaian tarif akan dilaksanakan setiap 2 tahun.

Tarif 18 ruas tol itu akan naik jika memenuhi SPM yang merupakan salah satu syarat. Pihaknya akan meninjau ke lapangan untuk memastikan terlebih dahulu pemenuhan SPM.

"Sebulan sebelum kenaikan tarif nanti, kami akan meminta data BPS [Badan Pusat Statistik] untuk menghitung besaran inflasi, kemudian menentukan kenaikan tarif jalan tol," ujarnya, Jumat (15/2).

Berdasarkan data BPJT terdapat masing-masing satu ruas yang tarifnya akan naik pada akhir April dan Agustus. Dua ruas akan naik pada November dan sisanya September.

PERBAIKAN

Direktur Operasional PT Jasa Marga Tbk Hasanudin mengatakan menyiapkan dana Rp70 miliar untuk perbaikan jalan tol yang tidak memenuhi SPM. "Pada laporan SPM semester II/2012, ada beberapa jalan tol kami yang tidak memenuhi SPM," katanya.

Adapun, dari 10 ruas tol yang tidak memenuhi SPM, lima di antaranya milik Jasa Marga yakni jalan tol Cawang-Tomang-Cengkareng, Jakarta Outer Ring Road (JORR), Ulujami-Pondok Aren, Sedyatmo (Bandara), serta Cipularang dan Padaleunyi.

Dia menjelaskan umumnya kerusakan terjadi pada pagar pembatas jalan tol, yakni pagar ruang

milik jalan (rumija) yang besinya dijebol. Selain itu pencurian baterai yang terdapat di solar cell penerangan jalan umum juga banyak terjadi.

Untuk membetulkan pagar yang rusak tersebut, lanjutnya, biasanya membutuhkan Rp800 juta di setiap ruasnya. "Karena banyak kasus pencurian ini, maka kami akan mengintensifkan pengamanan bagi aset perusahaan," jelasnya.

Guna memenuhi target waktu yang diberikan BPJT untuk memenuhi SPM di kelima ruas jalan tol tersebut, ujar Hasanudin, pihaknya sudah melakukan pekerjaan mulai saat ini.

Selain itu, guna memelihara 18 ruas yang dimiliki perusahaan dan anak perusahaan, Jasa Marga menganggarkan belanja modal Rp350 miliar untuk tahun ini.

"Kami sedang mempersiapkan overlay dan scrapping filling di seluruh ruas jalan tol milik Jasa Marga." (Dimas Novita S.)



Kementerian  
Perencanaan Pembangunan Nasional/  
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

12345678910111213141516171819202122232425262728293031

☐ Jan☐ Feb☒ Mar☐ Apr☐ Mei☐ Jun☐ Jul☐ Agt☐ Sep☐ Okt☐ Nov☐ Des

2013

☐ Kompas☒ Media Indonesia☐ Koran Tempo☐ Bisnis Indonesia

☒ Republika☐ Sinar Harapan☐ Suara Pembaruan☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka☐ Seputar Indonesia☐ Investor Daily☐ Kontan

☐ Suara Karya☐ Neraca☐ Jurnal Nasional☐ Indopos

☐ Lain-lain, .....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Bandara Kuala Namu Terkendala Aksesibilitas	<div>- Masih terdapat sejumlah perbaikan yang harus diselesaikan agar bandara dapat beroperasi dengan baik. Khususnya aksesibilitas dari bandara dan menuju bandara</div> <div>- Selain aksesibilitas, fasilitas-fasilitas pendukung bandara harus disiapkan. Sebab, bandara berkaitan erat dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi</div>		2013		PT. Angkasa Pura II	

Bandara Kuala Namu Terkendala Aksesibilitas

TANGERANG — Direktur Utama PT Angkasa Pura II Tri Sunoko menilai terlalu riskan apabila Bandar Udara (Bandara) Internasional Kuala Namu dipaksakan untuk diresmikan dan beroperasi pada April 2013.

Menurut Tri, masih terdapat sejumlah perbaikan yang harus diselesaikan agar bandara dapat beroperasi dengan baik. Khususnya, terkait aksesibilitas dari dan menuju bandara.

"Apabila aksesibilitasnya tidak baik, bukan lancar, tapi

malah banyak hambatan nanti. Ini sedang disempurnakan," tutur Tri usai menghadiri persmian NSW-Airportnet oleh Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan di Auditorium Gedung 600 Kantor Pusat Angkasa Pura II, Kompleks Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Rabu (13/3).

Selain aksesibilitas, Tri menyebut bahwa fasilitas-fasilitas pendukung bandara harus disiapkan. Sebab, bandara berkaitan erat dengan sistem penge-

lolaan yang terintegrasi.

Sehingga, jika operasional bandara dipaksakan pindah dari Polonia ke Kuala Namu, akan menimbulkan masalah.

Bandara Internasional Kuala Namu berada di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Bandara ini memiliki luas 1.365 hektare dengan area terminal seluas 118.930 meter persegi, luas area parkir 50.820 meter persegi. ■ muhammad iqbal

ed: zaky al hamzah